



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : KPW PROVINSI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AMERIZA MA'RUF MOESA
2. Jabatan : KEPALA PERWAKILAN
3. NHK : 236273

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **14.341.972.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 22 m2/22 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 20 m2/20 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 362 m2/314 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/50 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/65 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 23 m2/23 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 26 m2/26 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/78 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 24 m2/24 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 611.972.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 107 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.750.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 375.000.000

1. MOBIL, TOYOTA VOXY Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.

375.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 540.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 24.508.877

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 15.281.480.877

III. HUTANG

Rp. 1.134.388.861

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 14.147.092.016

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.